

Analysis Of Factors Influencing The Labor Force Participation Rate In Central Java: Case Study Of Districts/Cities

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Jawa Tengah: Studi Kasus Kabupaten/Kota

Cindy Amelia Putri^{1*}

Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

b300220156@student.ums.ac.id^{1*}

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to identify factors influencing the labor force participation rate at the district/city level in Central Java Province during 2019–2023. The research approach uses panel regression analysis, with the Fixed Effect Model (FEM) as the selected specification. The sample includes 29 districts and 6 cities, combining cross-sectional elements between regions and annual data. The analysis shows that the Human Development Index (HDI), District/City Minimum Wage, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) have a positive and significant influence on labor force participation; conversely, the Population variable does not contribute significantly. Based on these findings, it is recommended that local governments design policy strategies that emphasize increasing the HDI, appropriate minimum wage adjustments, and accelerating local economic growth to increase labor force participation and create new jobs.

Keywords: Labor Force Participation Rate; Human Development Index; Regional Minimum Wage; Gross Regional Domestic Product; Population; Central Java.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 2019–2023. Pendekatan penelitian menggunakan analisis regresi panel, dengan Fixed Effect Model (FEM) sebagai spesifikasi terpilih. Sampel mencakup 29 kabupaten dan 6 kota, menggabungkan elemen cross-section antarwilayah dan data tahunan. Analisis menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan bermakna terhadap partisipasi angkatan kerja; sebaliknya, variabel Jumlah Penduduk tidak berkontribusi secara signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar pemerintah daerah merancang strategi kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan IPM, penyesuaian upah minimum yang tepat, serta percepatan pertumbuhan ekonomi lokal guna meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan membuka lapangan kerja baru.

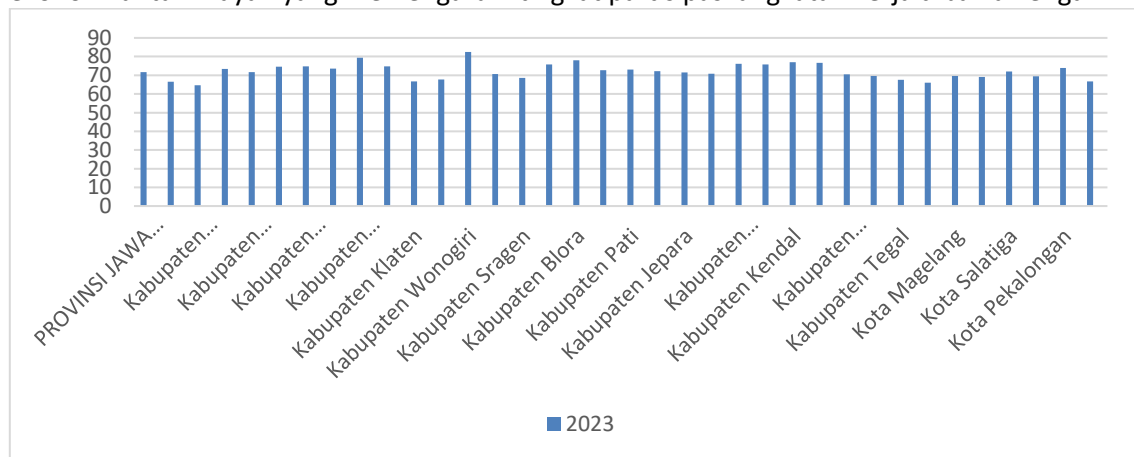
Kata Kunci: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Indeks Pembangunan Manusia; Upah Minimum Regional; Produk Domestik Regional Bruto; Jumlah Penduduk; Jawa Tengah.

1. Pendahuluan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat karena mencerminkan kondisi perekonomian suatu daerah (Muslinawati & Aziz, 2023). Rendahnya partisipasi tenaga kerja menunjukkan adanya ketidakseimbangan ekonomi yang dapat berdampak pada berbagai aspek seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Menurut Izzah (2019), TPAK mengukur proporsi penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan terhadap total populasi usia kerja. Pratiwi dan Wijaya (2024) menegaskan bahwa tenaga kerja, selain modal dan teknologi, merupakan faktor produksi vital dalam perekonomian makro, sehingga isu kesempatan kerja menjadi krusial. Indonesia dengan populasi besar memiliki potensi ekonomi tinggi, namun tantangan muncul ketika kualitas tenaga kerja dan produktivitas masih rendah, sehingga kebutuhan dasar sulit terpenuhi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk

memaksimalkan potensi ekonomi nasional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperkirakan berbanding lurus dengan meningkatnya TPAK, karena ekspansi ekonomi menciptakan lebih banyak peluang kerja dan mendorong partisipasi tenaga kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi pada periode 2019–2023, namun secara umum menunjukkan tren peningkatan. Secara agregat, TPAK naik dari 68,85% pada 2019 menjadi 71,72% pada 2023. Beberapa daerah mencatat perubahan mencolok, seperti Kabupaten Kebumen yang meningkat dari 68,72% menjadi 74,54%, serta Kabupaten Magelang yang mencatat TPAK tertinggi pada 2023 sebesar 79,45%. Sebaliknya, wilayah seperti Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan stagnan dengan sedikit penurunan dari 69,27% menjadi 69,18% pada periode yang sama. Variasi ini menggambarkan adanya perbedaan dinamika sosial dan ekonomi antarwilayah yang memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Tengah.



Gambar 1. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2023

Gambar 1 menunjukkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencerminkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten/Kota Jawa Tengah pada tahun 2023. Secara keseluruhan, rata-rata TPAK mencapai 71,72%. Kabupaten Wonogiri menempati posisi tertinggi dengan TPAK sebesar 82,42% diikuti oleh Kabupaten Magelang dengan 79,45% dan Kabupaten Blora dengan 78,02%. Sebaliknya, Kabupaten Brebes mencatat TPAK terendah yaitu 66,1%, disusul oleh Kabupaten Banyumas dengan 64,6%, dan Kabupaten Cilacap yang sebesar 66,6%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator ekonomi yang berperan penting dalam menentukan tingkat partisipasi angkatan kerja karena mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan dan kesejahteraan, akses pendidikan, serta standar hidup layak (Syaputro, 2022). IPM berfungsi mengukur kemajuan kualitas hidup masyarakat sekaligus menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan. Selain IPM, tingkat upah juga berpengaruh signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja, di mana peningkatan upah mendorong lebih banyak individu untuk memasuki pasar kerja. Menurut Soelistya (2018), kebijakan upah minimum yang baik dapat menjadi strategi pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita. Sejalan dengan itu, Putra dan Jember (2019) menegaskan bahwa upah tinggi memiliki daya tarik besar bagi masyarakat untuk bekerja, sementara upah rendah cenderung menurunkan minat kerja dan mendorong individu bergabung dalam kelompok non-pekerja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengukur total nilai tambah dari produksi barang/jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu (Noviatamara et al., 2019). Peningkatan PDRB diduga dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja (Dika Pramana Aditiya & Wildana, 2023; mengutip Sulistiawati, 2012). Selain itu, tingkat Upah Minimum Regional (UMR) memengaruhi penyerapan tenaga kerja karena memengaruhi keputusan perekrutan perusahaan. Pertumbuhan penduduk juga mendorong partisipasi angkatan kerja, namun jika lapangan kerja tidak seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang bertambah, efeknya dapat merugikan daerah. Di Jawa Tengah, populasi 2019–2023 berkisar 34,7–37,5 juta jiwa. Penelitian ini bertujuan menelaah pengaruh IPM, UMR, PDRB, dan JP terhadap TPAK pada kabupaten/kota di provinsi tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut Simanjuntak (1985), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan penduduk usia kerja dalam suatu kelompok tertentu. Ukuran ini menggambarkan proporsi penduduk usia produktif yang terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi di suatu wilayah atau negara. Semakin besar nilai TPAK, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang berkontribusi dalam proses produksi barang dan jasa di perekonomian. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan TPAK sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk berusia 10 tahun ke atas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan sebagai instrumen yang efisien untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan suatu negara maupun daerah. Variasi capaian IPM antarwilayah dapat dijadikan acuan penting bagi pemerintah dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan pembangunan. Misalnya, apabila suatu daerah memiliki nilai IPM rendah pada aspek pendidikan, maka pemerintah dapat memfokuskan alokasi sumber daya guna memperbaiki mutu pendidikan di wilayah tersebut. Pendidikan sendiri menjadi sarana penting untuk memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, serta mengasah keterampilan, sehingga peluang kerja semakin besar dan tingkat pendapatan turut meningkat (Ambya & Ciptawaty, 2022). Selain sebagai alat perencanaan, IPM juga berfungsi sebagai parameter dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan. Asmara (2024) menegaskan bahwa pembangunan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendekatan tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya perbaikan berkelanjutan, termasuk dalam konteks peningkatan IPM. Adapun komponen utama pembentuk IPM meliputi angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan.

Upah Minimum Regional

Berdasarkan Kementerian Perindustrian (2003), upah merupakan hak pekerja yang diberikan oleh pemberi kerja sebagai kompensasi atas jasa yang telah mereka lakukan. Imbalan ini dinyatakan dalam bentuk uang, memiliki sifat tetap, serta dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja, kontrak, atau regulasi yang berlaku. Selain itu, komponen upah juga mencakup berbagai tunjangan yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Selanjutnya, Imelda et al. (2021) menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan erat antara tingkat upah minimum regional dengan kondisi ekonomi suatu daerah. Daerah dengan UMR yang tinggi umumnya memiliki perekonomian yang lebih baik, karena besaran upah minimum sering kali mencerminkan kemampuan ekonomi wilayah dalam

memberikan penghargaan yang layak kepada tenaga kerja. Lebih lanjut, Salsabella et al. (2020) menegaskan bahwa upah memiliki peran strategis dalam meningkatkan motivasi pekerja, meskipun bukan merupakan faktor tunggal dalam penyerapan tenaga kerja. Upah lebih berfungsi sebagai instrumen pendukung yang membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup secara lebih layak.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, yang mencerminkan nilai keseluruhan barang dan jasa akhir (netto) yang diproduksi oleh kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sementara itu, Todaro dan Smith (2020) mendefinisikan PDRB sebagai ukuran yang merepresentasikan aktivitas ekonomi di suatu wilayah tertentu. PDRB juga sering dijadikan acuan utama dalam proses analisis serta perencanaan pembangunan ekonomi daerah (Rahayu et al., 2021). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Rostow dan Harrod-Domar, proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan ke dalam beberapa tahap. Salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan tersebut adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan dana dari masyarakat. Teori Harrod-Domar menegaskan bahwa semakin besar proporsi PDRB yang dialokasikan untuk tabungan, semakin tinggi pula akumulasi modal yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi

Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk diartikan sebagai individu yang menetap di wilayah geografis Republik Indonesia selama minimal enam bulan, atau mereka yang tinggal kurang dari enam bulan namun memiliki tujuan untuk menetap. Sementara itu, Silvie dan Hasmarini (2023) dalam penelitiannya mengutip pendapat Said yang menyatakan bahwa penduduk merupakan seluruh individu yang tinggal di suatu daerah pada periode tertentu sebagai hasil dari dinamika demografi seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk menggambarkan perubahan jumlah populasi yang bersifat dinamis akibat adanya faktor penambah dan pengurang, yakni kelahiran dan kematian yang secara ilmiah disebut sebagai pertumbuhan alami. Adapun perbedaan antara jumlah migrasi masuk dan keluar dikenal dengan istilah migrasi neto.

Hipotesis Penelitian

Ha 1 : Indeks Pembangunan Manusia diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Ha 2 : Updiah Minimum Regional diduga berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Ha 3 : Produk Domestik Regional Bruto diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Ha 4 : Jumlah Penduduk diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019 hingga 2023. Jenis data yang dimanfaatkan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan disajikan berdasarkan pembagian wilayah kabupaten dan kota. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi dengan pendekatan data panel, yang menggabungkan dimensi antarwilayah (*cross-section*) sebanyak 29 kabupaten dan 6 kota serta dimensi antarwaktu (*time series*) selama lima tahun,

yaitu 2019–2023. Dalam penerapan analisis data panel, digunakan tiga bentuk model regresi, yakni *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Penentuan model yang paling sesuai dilakukan melalui pengujian *Chow test* dan *Hausman test*.

Model persamaan yang digunakan sebagai berikut :

$$TPAK_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 LogUMR_{it} + \beta_3 LogPDRB_{it} + \beta_4 LogJP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (dalam %)

IPM : Indeks Pembangunan Manusia (dalam %)

UMR : Upah Minimum Regional (dalam juta rupiah)

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (dalam juta rupiah)

JP : Jumlah Penduduk (dalam juta/jiwa)

Log : Operator Logaritma Natural

β_0 : Konstanta

$\beta_1.. \beta_4$: Koefisien regresi variabel independen

i : Kabupaten/kota ke- i di provinsi Jawa Tengah

ε : Error term.

4. Hasil dan Pembahasan

Estimasi regresi pada model data panel dilakukan menggunakan tiga pendekatan *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Hasil estimasi dari ketiga pendekatan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Regresi CEM, FEM dan REM

Variabel	Koefisien Regresi		
	CEM	FEM	REM
C	-125,4784	-338,6568	-246,3823
IPM	0,094856	-0,243910	-0,074056
log UMK	13,32241	14,63390	22,77693
log PDRB	-3,029024	22,28991	-2,592781
log JP	1,959799	-0,661508	1,336203
R ²	0,138680	0,747857	0,250509
Prob F-statistik	0,000039	0,000000	0,000000

Uji Chow

Cross-section F (34, 136) = 9,663971; Prob. F = 0,0000

Uji Hausman

Cross-section random χ^2 (4) = 30,685614; Prob χ^2 = 0,0000

Setelah dilakukan estimasi dengan tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*, langkah selanjutnya adalah menentukan model yang paling sesuai untuk digunakan dalam analisis data panel. Terdapat dua tahap pengujian yang harus dilakukan. Pertama, dilakukan Uji Chow untuk membandingkan CEM dengan FEM. Kedua, dilakukan Uji Hausman untuk menentukan pilihan antara FEM dan REM.

Pada Uji Chow, kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai probabilitas F-statistic < α , maka H_0 ditolak, yang berarti model FEM lebih tepat digunakan dibandingkan dengan CEM. Sementara itu, pada Uji Hausman, apabila nilai probabilitas χ^2 < α , maka H_0 juga ditolak, yang menandakan bahwa FEM lebih sesuai digunakan dibandingkan REM.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel, nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar $0,000 < \alpha$ (0,01), sehingga H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model FEM merupakan model terbaik untuk mengestimasi data panel. Selanjutnya, hasil Uji Hausman memperlihatkan nilai probabilitas χ^2 sebesar $0,000 < \alpha$ (0,01), yang kembali menolak H_0 dan mengonfirmasi

bahwa FEM adalah model paling tepat untuk digunakan dalam analisis ini. Hasil estimasi akhir dari model FEM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Regresi FEM

$TPAK_{it} = -338,6568 - 0,243910 IPM_{it}^* + 14,63390 \log UMK_{it}^{**} + 22,28991 \log PDRB_{it}^* - 0,661508 \log JP_{it}$			
$R^2 = 0,747857; F\text{-stat} = 10,61515; \text{Prob. } F\text{-stat} = 0,0000$			

Dengan nilai p F = 0,000 (< 0,01) maka H_0 ditolak artinya IPM, UMP kabupaten, PDRB, dan jumlah penduduk secara bersama-sama memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten/kota Jawa Tengah selama 2019–2023. R^2 sebesar 0,747857 berarti $\pm 74,79\%$ variasi partisipasi angkatan kerja dijelaskan oleh keempat variabel ini; sisanya sekitar 25,21% berasal dari faktor lain di luar model.

Tabel 3. Hasil uji t

Variabel	Koefisien	Prob. t	Kesimpulan
IPM	0.243910	0,0005	β_1 berpengaruh nyata pada $\alpha = 0,01$
logUMK	14.63390	0,0107	β_2 berpengaruh nyata pada $\alpha = 0,05$
logPDRB	22.28991	0,0001	β_3 berpengaruh nyata pada $\alpha = 0,01$
logJP	-0.661508	0,9330	β_4 tidak berpengaruh nyata

Hasil tabel menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan. Sebaliknya, Jumlah Penduduk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap TPAK.

Koefisien UMK sebesar 14,63390 mengindikasikan bahwa kenaikan 1% pada logUMK akan meningkatkan TPAK sekitar 0,146. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi upah minimum di suatu wilayah, semakin besar daya tarik pasar tenaga kerja bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, koefisien PDRB sebesar 22,28991 berarti setiap kenaikan 1% logPDRB akan mendorong TPAK naik sekitar 0,223. Pertumbuhan PDRB mencerminkan peningkatan kegiatan ekonomi daerah yang memperluas lapangan kerja dan meningkatkan permintaan tenaga kerja, sehingga mendorong partisipasi masyarakat.

Sebaliknya, koefisien IPM sebesar -0,243910 menunjukkan bahwa kenaikan 1 poin IPM menurunkan TPAK sekitar 0,24%. Hal ini kemungkinan terjadi karena individu dengan IPM lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, cenderung menunda masuk ke pasar kerja untuk melanjutkan pendidikan atau karena telah menikmati kondisi kesejahteraan yang lebih baik, sehingga partisipasi dalam angkatan kerja menurun.

Pembahasan

Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan hubungan negatif dan signifikan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; dengan kata lain, peningkatan IPM justru berkaitan dengan penurunan keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja. Hal ini dapat dimaknai bahwa komponen IPM terutama pendidikan mendorong lebih banyak individu untuk melanjutkan studi atau menunda masuk ke pasar kerja formal, sehingga angka partisipasi tidak otomatis meningkat. Temuan ini sejalan dengan Drean (2024) yang menyatakan bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan dapat menunda atau mengubah pola partisipasi tenaga kerja.

Sebaliknya, kenaikan Upah Minimum Kabupaten berasosiasi positif dan signifikan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Artinya, peningkatan besaran upah minimum menarik minat lebih banyak masyarakat untuk bekerja; kenaikan upah berfungsi sebagai insentif ekonomi yang meningkatkan jumlah pencari kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Hasil ini

konsisten dengan temuan Audilla (2025) di Provinsi Jawa Tengah yang melaporkan hubungan positif antara peningkatan upah minimum dan partisipasi tenaga kerja.

Selain itu, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tercermin dari kenaikan PDRB mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, ekspansi kegiatan ekonomi di daerah berkaitan erat dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi, selaras dengan hasil penelitian Dika Pramana Aditiya & Wildana (2023) dan Damayanti (2022).

Variabel jumlah penduduk menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TPAK, yang mengindikasikan bahwa pertambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah tidak selalu diikuti oleh peningkatan penduduk yang aktif bekerja. Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak disertai perluasan kesempatan kerja cenderung menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian Silvie & Hasmarini (2023) dan Ramadhan (2023), yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak selalu berdampak signifikan terhadap TPAK karena sebagian penduduk berada dalam kelompok usia non-produktif atau belum terserap dalam pasar tenaga kerja.

Secara simultan, keempat variabel IPM, UMK, PDRB, dan JP memiliki pengaruh signifikan terhadap TPAK dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,747857. Artinya, sekitar 74,78% variasi TPAK dapat dijelaskan oleh variasi pada keempat variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika partisipasi tenaga kerja di Jawa Tengah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan kebijakan upah, sementara faktor sosial seperti IPM dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang lebih kompleks dan tidak selalu linier terhadap peningkatan TPAK.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan model Fixed Effect Model (FEM) pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023, dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Penduduk (JP) memberikan pengaruh yang berbeda terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). IPM menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap TPAK, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia cenderung menurunkan tingkat partisipasi kerja karena sebagian individu lebih memilih melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan dengan kriteria tertentu. Sebaliknya, UMK memiliki efek positif dan signifikan terhadap TPAK, menandakan bahwa kenaikan upah minimum dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif memasuki dunia kerja. PDRB juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK, sehingga pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong partisipasi tenaga kerja. Sementara itu, jumlah penduduk berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap TPAK, yang berarti pertambahan penduduk tidak selalu diikuti peningkatan partisipasi kerja jika tidak disertai dengan tersedianya lapangan pekerjaan.

Secara keseluruhan, faktor ekonomi seperti upah minimum dan pertumbuhan ekonomi memainkan peran utama dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan faktor sosial seperti kualitas sumber daya manusia dan kondisi demografi menunjukkan pengaruh yang lebih kompleks terhadap TPAK.

Daftar Pustaka

Ambya, & Ciptawaty, U. (2022). Spatial Relationship Between Low Income Population and Regional Development Index in Mesuji District. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 23(1), 146–154.

<https://doi.org/10.23917/jep.v23i1.16907>

- Asmara, K. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sampang. *Journal of Economics Development Issues*, 7(1), 16–22.
- Audilla, Y. F., & Rachmawati, L. (2025). Assessing the Influence of Minimum Wage, Education, and Poverty on the Labor Force Participation Rate: Evidence from Central Java Province. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.26905/jrei.v6i1.15166>
- Damayanti, D. R., Utami, G. S., & ... (2022). Analysis of the Effect of Gross Regional Domestic Product, Labor Force Participation Rate and Unemployment on Poverty in North Sumatra Province in 2001-2020. *Prosiding Seminar ...*, 1(1), 51–62.
- Dika Pramana Aditiya, & Wildana, M. D. A. (2023). Analisis Pengaruh Sektor Informal, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Jawa Timur Tahun 2018-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 505–521. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.04>
- Drean, B. (2024). Human Capital and Labor Force Participation Rate : Exploring the Role and Relationship to Poverty in Indonesia. *Tamansiswa Accounting Journal International*, 15(1), 76–89.
- Imelda, R., Balafif, M., & Wahyuni, S. T. (2021). Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998-2017. *Bharanomics*, 1(2), 67–74.
- Izzah, N. (2019). Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Provinsi, Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Jakarta 2004 -2013. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(2), 156–170. <https://doi.org/10.31334/trans.v7i2.45>
- KEMENPERIN. (2003). Undang - Undang RI No 13 tahun 2003. *Ketenagakerjaan*, 1.
- Muslinawati, R., & Aziz, K. F. (2023). Pertumbuhan Ekonomi dengan Dua Faktor Kerja di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 5093–5101.
- Noviatamara, A., Ardina, T., & Amalia, N. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 53–60.
- Pratiwi, T. H., & Wijaya, R. S. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Terhadap TPAK di Kota Semarang. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 581–592.
- Putra, W., & Jember, M. (2019). Pengaruh Modal, Teknologi Dan Kewirausahaan Terhadap Nilai Produksi Dan Pendapatan Industri Pakaian Jadi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9, 965.
- Rahayu, H. C., Purwantoro, & Setyowati, E. (2021). Measuring the Effect of Inequality and Human Resource Indicators to Poverty Density in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(2), 153–160. <https://doi.org/10.23917/jep.v22i2.13631>
- Ramadhan, B. A., & Setyowati, E. (2023). Analisis Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten Tahun 2017-2021. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 82–89. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i3.2065>
- Salsabella, A. D., Hidayat, W., & Kusuma, H. (2020). Pengangguran Terbuka Dan Determinannya Di Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(2), 208–221.
- Silvie, F. D., & Hasmarini, M. I. (2023). Economics and Digital Business Review Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, IPM, PDRB dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 374–382.

- Simanjuntak, P. J. (1985). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indo.
- Soelistyo, N. A. P. dan A. (2018). Analisis Pengaruh Upah, Pdrb, Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dikawasan Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 357–371.
- Syaputro, L. W. (2022). Determinasi yang Mempengaruhi IPM di Jawa Tengah Tahun 2017-2020. *Ecoplan*, 5(1), 20–28. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i1.344>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson UK